

# JURNAL PIR

## POWER IN INTERNATIONAL RELATION

[BERANDA](#)   [TENTANG KAMI](#)   [LOGIN](#)   [DAFTAR](#)   [##NAVIGATION.CATEGORIES##](#)  
[CARI](#)   [TERKINI](#)   [ARSIP](#)   [FOKUS & RUANG LINGKUP](#)   [DEWAN EDITOR](#)  
[REVIEWER](#)   [PETUNJUK PENULIS](#)   [ETIKA PUBLIKASI](#)   [KEBIJAKAN PLAGIARISME](#)

[Beranda](#) > [Arsip](#) > **Vol 2, No 2 (2018)**

## Vol 2, No 2 (2018)

### PIR FEBRUARI 2018

Rasa syukur dan ucapan terima kasih ditujukan pertama-tama kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmatnya Jurnal Power in International Relations (PIR) Vol. 2 no. 2 akhirnya selesai dan diterbitkan.

Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama Medan. Jurnal diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini merupakan salah satu wadah berbagi pengetahuan maupun hasil penelitian yang selesai dan belum pernah diterbitkan sebelumnya. Setiap tulisan dalam jurnal ini bukan hasil plagiasi dan lolos review (pengkajian) secara acak.

Jurnal ini tidak akan terbit tanpa bantuan dari para penulis dan reviewer yang hebat. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada para reviewer yang telah berkenan menjalin kerjasama diantaranya, Ibu Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi (Universitas Parahyangan Bandung), Bapak Ade Marup Wirasenjaya (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), bapak Abdul Manan Maruli (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Akhirnya, kami berharap bahwa tulisan dalam jurnal PIR ini akan menjadi sebuah catatan penting dalam pengkajian Hubungan Internasional dan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan ilmiah. Kami berharap para reviewer maupun penulis yang telah melakukan kerja keras dalam jurnal PIR Vol. 2 no. 2 ini mampu berkontribusi secara aktif dalam pengembangan keilmuan Hubungan Internasional.

# Daftar Isi

## Hubungan Internasional

<u>The Thought of Developing Halal Maritime Tourism Destination Towards Indonesia's Vision as a World Maritime Axis</u> Anita Afriani Sinulingga, Silsila Asri, Sofia Trisni	<a href="#">PDF</a> 103-113
<u>Peran Perserikatan Buruh Dunia Terhadap Kekerasan Apartheid Zionis Israel Di Palestina</u> Ibnu Zulian	<a href="#">PDF</a> 114-131
<u>Politik Luar Negeri Indonesia Di Lihat Dari UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri</u> Nori Oktadewi, Wahyu Wahyu	<a href="#">PDF</a> 132-146
<u>Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan Melalui Kerjasama Asean Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY</u> Sofia Trisni, Anita Afriani Sinulingga, Rika Isnarti	<a href="#">PDF</a> 147-160
<u>Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris</u> Posmanto Marbun	<a href="#">PDF</a> 161-178
<u>Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina</u> Muh. Novan Prasetya, Aulia Srifauzi	<a href="#">PDF</a> 179-193

Kantor Redaksi **Jurnal Power in International Relations (PIR)** . Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulla Medan 20241



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional](#).

## **Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan Melalui Kerjasama Asean Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY**

Sofia Trisni, Anita Afriani S, Rika Isnarti  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas  
sofiatrisni@soc.unand.ac.id, anitaafriani@soc.unand.ac.id, rikaisnarti@soc.unand.ac.id

### **ABSTRAK**

*Konflik Laut Tiongkok Selatan merupakan konflik yang menarik perhatian Indonesia karena berbagai faktor, seperti faktor kedekatan geografis dan faktor negara-negara yang terlibat dalam konflik. Terlibatnya empat negara ASEAN dalam konflik ini serta posisi the rising power Tiongkok sebagai claimant utama dalam konflik ini tak pelak merupakan alasan utama Indonesia untuk berperan aktif dalam mencari solusi penyelesaian konflik. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk meredakan konflik multilateral ini pada masa pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tulisan ini menjelaskan upaya Indonesia dengan cara menganalisis aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Indonesia terkait konflik LTS sepanjang tahun 2011-2013. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik adalah upaya dengan memanfaatkan kerjasama ASEAN. Melalui ASEAN, Indonesia berupaya untuk memastikan agar negara-negara yang terlibat konflik mau menyelesaikan permasalahan ini secara multilateral, yaitu melalui mekanisme ASEAN.*

**Kata kunci :** Indonesia, Tiongkok, ASEAN, Konflik Laut Tiongkok Selatan

### **ABSTRACT**

*The South China Sea dispute drag Indonesia's attention because of some factors such as geographical proximity and countries involve in the dispute. The involvement of four ASEAN member countries and the rising power China as the major claimant count as Indonesia's ultimate reason to actively find the solution of the dispute. This article aims to describe Indonesia's effort in preventing escalation of conflict under Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) administration. This article looks into Indonesia effort by analyse Indonesia's activities relate to conflict between 2011-2013. It identifies that Indonesia's effort is through employment of ASEAN. Through ASEAN, Indonesia tried to assure that the member countries engage in dispute agreed to resolve the conflict using ASEAN framework.*

**Keywords :** Indonesia, Tiongkok, ASEAN, The South China Sea Dispute

### **PENDAHULUAN**

Konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan sebuah konflik yang telah berlangsung lama dan melibatkan 4 negara ASEAN serta Tiongkok dan Taiwan. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut, seperti pengagasan dialog antar negara yang berkonflik, pembuatan *Draft of Conduct (DoC)* sampai upaya untuk membuat sebuah *Code of Conduct (CoC)* yang lebih mengikat.

Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan ASEAN turut terlibat aktif dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan ini karena beberapa hal; yang pertama karena klaim kepemilikan LTS yang dilakukan oleh Tiongkok melalui 9 garis putus-putus nya telah mengancam ZEE Indonesia disekitar wilayah kepulauan Natuna. Kedua, karena konflik ini melibatkan hampir separuh negara ASEAN, sehingga eskalasi konflik akan dapat membahayakan Indonesia. Ketiga, terlibatnya beberapa negara ASEAN dalam konflik menimbulkan isu mengenai perpecahan dalam ASEAN, yang merupakan isu yang tidak diinginkan oleh Indonesia sebagai negara yang merupakan salah satu pendiri ASEAN.

Indonesia terlibat secara aktif dalam setiap upaya pencegahan eskalasi konflik. Upaya-upaya ini mulai dari menjadi tuan rumah pelaksanaan dialog antar negara-negara yang bertikai, secara aktif mensponsori berbagai pertemuan agar Tiongkok mau menyepakati DoC sampai secara aktif mencoba memastikan agar penyelesaian masalah ini dilakukan dengan menggunakan *framework multilateral*, atau dengan kata lain menggunakan kerjasama ASEAN. Indonesia sepertinya menginginkan penyelesaian konflik secara damai yang melibatkan organisasi regional ini, karena kekhawatiran bahwa penyelesaian bilateral tidak akan mampu untuk mewakili kepentingan negara lain yang juga mengajukan klaim kepemilikan terhadap wilayah yang dipersengketakan.

Keterlibatan Indonesia dalam sengketa wilayah ini terbilang sudah cukup lama, yaitu dari awal mula bergolaknya sengketa. Tetapi sikap asertif Tiongkok yang memunculkan respon negara-negara ASEAN meningkat pada masa kepemimpinan presiden SBY (2005-2015), yang merupakan periode krusial dari pelaksanaan ASEAN Community. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan SBY terbilang sangat aktif dalam menyelesaikan sengketa, sehingga tidak heran dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2012, Hillary Clinton memberikan pujian terhadap upaya Indonesia ini. Selain itu, Sekjen ASEAN pada masa itu juga secara khusus meminta agar Indonesia terus terlibat aktif dalam mencari jalan keluar dari konflik ini.

Tulisan ini berusaha untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan konflik LTS. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menggunakan kerjasama ASEAN. Untuk itu, tulisan ini menjelaskan argumen yang mendukung pernyataan diatas. Tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu penguraian

mengenai Konflik LTS, uraian mengenai Indonesia dan posisinya terkait konflik, serta menjabarkan upaya-upaya yang telah dilakukan negara ini untuk meredam konflik pada masa presiden SBY. Adapun masa kepemimpinan SBY diambil untuk dibahas karena banyaknya bentrokan yang terjadi pada masa ini yang berpengaruh signifikan pada ASEAN serta banyaknya pujian yang muncul terhadap Indonesia karena konsistensinya dalam mengawal konflik.

## **PEMBAHASAN**

### **Konflik Laut Tiongkok Selatan**

Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah laut dengan total luas 3.5 Juta kilometer persegi yang mencakupi teluk Thailand (Zhiguo 2005), berdekatan dengan pantai barat Asia Tenggara, Kalimantan dan kepulauan Filipina (Weasley 2012). LTS juga menghubungkan Asia Timur Laut dan Pasifik Barat dengan Samudera Hindia dan Timur Tengah yang dilewati sekitar 1/3 industri perkapalan global (Baviera, 2005). Selain itu, LTS juga merupakan sebuah kawasan yang kaya akan stok ikan dan hidrokarbon (Weasley 2012). Karena berbagai keunggulan yang dimilikinya, luasnya wilayahnya yang melewati banyak negara, LTS menjadi wilayah yang diklaim kepemilikannya oleh banyak negara. Setidaknya terdapat enam negara yang mengklaim kepemilikannya atas LTS yaitu Tiongkok (Klaim terhadap seluruh wilayah LTS), Taiwan, Vietnam (Klaim terhadap seluruh wilayah LTS), Malaysia (batas wilayah), Brunei Darussalam (batas wilayah) dan Filipina (klaim terhadap beberapa pulau yang berada di sekitar negaranya).

Terlepas dari klaim keenam negara diatas, terdapat negara lain yang juga menaruh perhatian besar terhadap konflik ini, yaitu Indonesia dan Amerika. Bagi Indonesia konflik ini menjadi spesial karena '9 dotted-lines' yang diumumkan oleh Tiongkok yang merupakan klaim terhadap seluruh wilayah lautan Tiongkok Selatan telah mengganggu ZEE Indonesia di kepulauan Natuna, yang merupakan kepulauan dengan kekayaan gas alam. Walaupun Tiongkok berkali-kali mengungkapkan bahwa negara ini tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia, tetapi klaim ini tetap menghasilkan ketidak amanan bagi Indonesia, walaupun Indonesia menolak untuk disebut sebagai salah satu negara pengklaim/negara yang terlibat dalam konflik ini. Selain Indonesia, terdapat juga Amerika Serikat yang merasa terganggu *freedom of navigation* nya jika wilayah LTS diklaim oleh satu negara. LTS selama ini merupakan wilayah laut internasional, yang mana di wilayah laut internasional negara dapat bebas untuk lewat, baik di laut ataupun udaranya, bebas untuk mengadakan latihan perang dan bebas untuk melakukan penelitian terhadap

biodiversitas laut. Jika LTS diklaim oleh satu pihak, semua kebebasan yang didapatkan di wilayah laut internasional akan tercabut.

Klaim Tiongkok terhadap LTS disertai dengan peningkatan asertivitas dan agresifitasnya di wilayah laut tersebut. Contoh peningkatan asertivitas Tiongkok terlihat pada tahun 2010 silam adalah ketika Beijing melakukan perluasan dan peningkatan fasilitas militernya di Paracel dan Spratly, termasuk pembangunan lapangan udara dan peningkatan kapasitas pertahanan (Swaine dan Fravel, 2012). Strategi untuk mempertunjukkan kepemilikannya terhadap LTS dilakukan oleh negara tirai bambu ini dengan melakukan latihan militer, patroli secara reguler di LTS dan pelarangan memancing di wilayah yang dipersengketakan. Pada tahun 2010, *People Liberation Army* (PLA) melakukan pelatihan militer dengan melibatkan 100 kapal dan 1800 marinir (C. Ungerer 2010). Pada bulan Maret 2011, Menteri Luar Negeri Yang Jiechi mengumumkan pelarangan eksplorasi minyak di wilayah LTS yang diklaim oleh Tiongkok (C.A. Thayer 2011) yang kemudian diikuti dengan pengumuman perusahaan minyak Tiongkok mengenai kerugian tahunan yang dialami oleh negara ini karena eksplorasi minyak yang dilakukan oleh para eksplorasi ilegal. Kerugian yang diklaim oleh Tiongkok adalah sebesar 20 juta ton minyak pertahun, yang setara dengan 40% dari hasil minyak negara ini dalam satu tahun (C.A. Thayer 2011).

Sikap-sikap asertif dan agresif diatas bukanlah tidak berlanjut. Pada bulan Juli 2012 Tiongkok mengumumkan bahwa negara ini telah membangun pertahanan militer di pulau Woody yang merupakan bagian dari grup Paracel, walaupun pertahanan militer tersebut masih dengan kapasitas yang terbatas (Storey 2013). Selain itu, laporan *Jane's Intelligence Weekly* menulis bahwa Tiongkok berencana untuk meningkatkan kapasitas pengawasan militernya dari 9000 personel menjadi 15,000 personel pada tahun 2015. Armada patrol meningkat ke 350 kapal selam pada tahun 2015 dan menjadi 520 kapal selam pada tahun 2020 dengan 16 pesawat tempur pada tahun 2015. Lebih lanjut, Tiongkok akan menjadi operator kapal selam terbesar dengan armada patrol akan ditingkatkan dari 70 bot dengan 21 buah di tempatkan di LTS (Supryanto 2013).

Peningkatan armada militer ini menimbulkan ketakutan akan bahaya kebangkitan Tiongkok. Ditambah lagi tindakan-tindakan agresif tersebut juga disertai dengan pernyataan presiden Xi Jinping pada tahun 2013 bahwa "*we must firm up our confidence in constructing a strong military; we must devote ourselves to the materialization of a*

*strong army*" (W.Lam 2013). Pernyataan ini seolah-olah memberikan sinyal bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan kekuatan militernya untuk menghadapi berbagai konflik yang melibatkan mereka.

Tindakan-tindakan agresif Tiongkok diatas kemudian direspon dengan aksi yang sama oleh negara-negara yang terlibat, seperti Vietnam dan Filipina. Aksi balasan inilah yang kemudian meningkatkan tensi di LTS. Masing-masing pihak yang beronflik saling mencurigai dan saling berbalas aksi, sehingga memberikan sinyal kecemasan bagi negara-negara yang berada disekitar kawasan tersebut. Tidak hanya sampai disitu, perilaku Tiongkok yang memperkuat armada militernya, ditambah dengan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka tidak segan-segan untuk menggunakan cara kekerasan untuk mempertahankan wilayah yang diklaimnya, menambah ketegangan konflik. Peningkatan anggaran militer dan peningkatan kekuatan militer telah meningkatkan alarm bagi negara-negara claimant.

Kekayaan alam dan posisi strategis yang dimiliki oleh LTS menjadikan konflik LTS sebagai konflik yang menjadi sorotan dunia. Selain itu, banyaknya jumlah negara yang terlibat konflik turut mencuri perhatian terkait mekanisme terbaik yang dapat memuaskan berbagai pihak. Tidak sedikit negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia turut berusaha untuk menyelesaikan konflik. Pada kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2010 yang lalu, Hillary Clinton secara khusus menyampaikan hirauan serius Amerika terhadap situasi keamanan wilayah laut ini. Clinton tidak lupa untuk memberikan pujiannya terhadap upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik dan meminta Indonesia untuk terus konsisten dalam menyelesaikan konflik.

### **Indonesia dan Konflik Laut Tiongkok Selatan**

Telah disinggung sebelumnya bahwa klaim yang tumpang tindih di LTS telah mengancam kedaulatan ZEE Indonesia di kepulauan Natuna. Sementara itu, menjaga kedaulatan negara merupakan kebijakan luar negeri Indonesia yang utama pada tahun 2013, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam pidato tahunannya pada Januari 2013 (Natalegawa 2013). Indonesia tidak ingin terjadi permasalahan terkait ZEE di kepulauan Natuna yang merupakan kepulauan yang kaya akan gas alam, sehingga eksplorasi sumber daya dapat terganggu.

Selain itu, konflik ini melibatkan empat dari sepuluh negara ASEAN. ASEAN telah lama menjadi bagian penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia merupakan salah satu pendiri organisasi regional ini pada tahun 1967 bersama Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Saat ini keanggotaan ASEAN telah berjumlah sepuluh negara dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar. Selain itu, ASEAN penting bagi Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ahli dibawah ini. Dewi Fortuma Anwar (2002) menjelaskan bahwa ASEAN penting karena wilayah negara-negara ASEAN berjarak relatif dekat dengan Indonesia, sehingga setiap ketegangan, guncangan dan konflik yang terjadi di regional ini dikhawatirkan akan dapat mengganggu wilayah Indonesia.

Selain itu, Anwar menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan ASEAN penting bagi Indonesia. Pertama, ASEAN membantu untuk menjaga *image* Indonesia di dunia internasional, sebagai sebuah simbol kongkrit terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan politik, pembangunan ekonomi dan harmonisasi regional. Kedua, ASEAN memberikan kontribusi terhadap keamanan regional. Sebelum berdirinya ASEAN, kawasan ini merupakan sebuah kawasan yang tidak stabil, terkait situasi perang dingin yang sedang terjadi waktu itu; keberadaan ASEAN mampu menstabilkan negara-negara anggotanya. Berbagai komitmen yang disepakati oleh negara-negara ASEAN seperti salah satunya Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC) mampu memberikan rasa damai dan saling percaya kepada negara-negara anggota.

Ketiga, ASEAN mampu memberikan rasa aman kepada Indonesia. Negara-negara ASEAN yang berada di utara wilayah Indonesia merupakan sebuah *buffer zone* bagi Indonesia. Jika terjadi serangan dari wilayah utara, maka Indonesia akan memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum serangan tersebut sampai ke negaranya. Keempat, dengan menjadikan ASEAN sebagai *buffer zone* maka Indonesia memiliki kesempatan untuk berkonsentrasi terhadap permasalahan domestiknya. Kelima, ASEAN merangsang kerjasama regional. Salah satu wujud dari kerjasama regional ini adalah pelaksanaan integrasi regional melalui pelaksanaan ASEAN *Community*. Keenam, ASEAN merupakan alat negosiasi bagi Indonesia. Seringkali, negara-negara kawasan Asia Tenggara melakukan negosiasi dengan negara lain dengan menggunakan ASEAN, sehingga negosiasi yang dilaksanakan lebih kuat dan solid, karena merupakan sebuah kesepakatan dari 10 negara. Ketujuh, ASEAN memberikan nilai tambah terhadap posisi Indonesia baik di kawasan maupun di dunia. ASEAN memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk



menjadi pemimpin di wilayah ASEAN dan memperlihatkan eksistensinya kepada dunia. Terakhir, walaupun ASEAN bukanlah sebuah kerjasama keamanan, tetapi keberadaan ASEAN tidak menutup kemungkinan kepada negara-negara anggotanya untuk melaksanakan kerjasama keamanan. Bentuk nyata kerjasama dalam bidang keamanan adalah dengan diselenggarakannya ASEAN Defence Ministers Meeting.

Selain itu, Abdul Irsan yang menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa untuk Belanda pada tahun 2002 menulis bahwa solidaritas regional ASEAN serta rasa aman yang diberikan merupakan sebuah kendaraan bagi Indonesia dalam pengembangan ekonominya. Artinya disini, ASEAN bukan hanya merupakan sebuah organisasi untuk menjalin persaudaraan, tetapi lebih daripada itu, ASEAN dimanfaatkan oleh Indonesia untuk berbagai percepatan negara, salah satunya percepatan ekonomi. Ditambahkan oleh Adnan bahwa ASEAN merupakan sebuah kerjasama yang telah lama dan memberikan keuntungan bagi Indonesia, sehingga akan lebih menyenangkan bagi Indonesia untuk mempertahankan kerjasama ini dibandingkan harus membentuk sebuah kerjasama baru dari awal lagi (2002). Menjaga stabilitas ASEAN pada dasarnya merupakan sebuah pilihan yang lebih baik bagi Indonesia, karena memulai kerjasama baru tentu akan memakan waktu yang panjang.

Pentingnya ASEAN ini terlihat pada posisi ASEAN yang berada pada posisi pertama dari 8 poin yang merupakan arah kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam website kementerian luar negeri Indonesia :

*To take on a more significant role and leadership in ASEAN and in the establishment of ASEAN Community 2015, which is conducted through ; The development and implementation of the grand design of ASEAN community, The improvement of technical coordination and introduction of ASEAN blueprint, Indonesia's active participation in each and every ASEAN forum*

Selanjutnya, arti penting ASEAN juga terlihat dari *major concern* yang selalu diperlihatkan oleh Indonesia pada setiap permasalahan yang menimpa ASEAN. Contohnya adalah ketika ASEAN gagal dalam menghasilkan *joint comunique* pada tahun 2012, Presiden SBY segera mengadakan konferensi pers berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam konferensi pers, presiden sebagaimana dikutip oleh *the Jakarta Post* menyatakan bahwa :

*This has never happened since the ASEAN was established. I am disappointed and really concerned; this could lead to misperceptions or false representation of ASEAN. The media has said ASEAN has broken apart and there was no longer unity in the region. I disagree. ASEAN has not broken up and it remains unity in spite of the ongoing problems that need to be solved.*

Pernyataan diatas memperlihatkan perhatian besar Indonesia pada ASEAN. Pada saat orang-orang mulai berasumsi bahwa ASEAN akan segera retak, sang presiden segera mengadakan konferensi pers untuk memberikan keyakinan pada khalayak ramai bahwa ASEAN tidak sedang menghadapi kehancurannya, ASEAN hanya sedang menghadapi perbedaan persepsi. Selanjutnya permasalahan ini ditindaklanjuti dengan mengirim Menlu Natalegawa untuk melakukan *shuttle diplomacy* ke empat negara ASEAN dalam dua hari, untu memastikan bahwa ASEAN tetap memiliki satu suara. *Sense of belonging* Indonesia yang sangat kuat terhadap ASEAN terlihat jelas melalui kejadian diatas. Indonesia tidak pernah menginginkan ada pihak-pihak yang berasumsi negatif terhadap ASEAN, Indonesia juga tidak pernah menginginkan negara-negara anggota ASEAN untuk turun kepercayaan akan eksistensi ASEAN. Bagi Indonesia, sangat penting untuk menjaga kepercayaan ini, sehingga penting juga kemudian untuk mencari cara terbaik dengan menggunakan kerangka kerjasama ASEAN.

Deskripsi diatas menunjukkan arti penting ASEAN bagi Indonesia, yang kemudian membuat keinginan Indonesia untuk menyelesaikan konflik LTS menjadi berlipat ganda. Selain permasalahan keamanan kedaulatan dan pentingnya ASEAN, hal tambahan yang menjadi kepedulian Indonesia adalah pelaksanaan ASEAN *Community* pada tahun 2015. Komunitas ASEAN merupakan sebuah bentuk integrasi yang meliputi tiga pilar, yaitu Ekonomi, Politik dan Keamanan serta Sosial Budaya, dimana Indonesia merupakan salah satu negara penggagasnya. Konflik yang semakin memanas ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas wilayah, sehingga integrasi yang telah lama digagas ini dapat terganggu pelaksanaannya.

### **Upaya Indonesia untuk meredam Konflik Laut Tiongkok Selatan**

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai arti pentingnya menjaga keamanan di wilayah Asia Tenggara bagi Indonesia. Sengketa LTS direspon oleh Indonesia dengan menginisiasi berbagai kegiatan untuk mencari solusi. Pada tahun 1990-an, Indonesia mensponsori dialog antara negara-negara yang bersengketa dengan sponsor dana dari Kanada. Dialog ini sebenarnya memberikan hasil yang cukup baik bagi pihak yang berkonflik, karena mampu memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa tidak akan terjadi penyerangan dari salah satu negara yang bertikai. Sayangnya kegiatan ini terhenti karena berakhirnya sponsor dana dari negara donor (Zhiguo, 2005).

Tidak berhenti sampai disana, Indonesia tetap aktif dalam mencari solusi penyelesaian konflik LTS. Indonesia sepertinya merasa bahwa penyelesaian konflik dengan menggunakan format kerjasama ASEAN merupakan jalan yang terbaik, hal ini terlihat dari setiap aktivitas strategik yang dilakukan Indonesia terkait konflik ini yang hampir selalu melibatkan ASEAN. Hal ini juga sejalan dengan argumen Rizal Sukma yang menjelaskan bahwa *“Instead of developing its political-security relations with China directly, Indonesia preferred to deal with China within multilateral framework, either through ASEAN or ASEAN Regional forum (ARF)”* (2009). Kenyamanan menggunakan format ASEAN ini adalah karena dengan menggunakan format multilateral, negara-negara ASEAN yang relatif kecil dari segi ukuran dan perekonomian dapat menjadi lebih kuat (D. Blumenthal, 2012).

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik dengan menggunakan kerjasama ASEAN terlihat pada undangan negara ASEAN, yang disponsori oleh Indonesia, kepada Tiongkok untuk menandatangani Treaty of Amity and Cooperation (TAC), yang merupakan sebuah kesepakatan negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai (website ASEAN). Melalui TAC, negara-negara ASEAN bersepakat untuk tidak akan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang melibatkan mereka. Kesepakatan ini kemudian diperluas daya ikatnya dengan mengajak negara-negara mitra ASEAN atau yang ingin bekerjasama dengan negara-negara dalam kawasan ini untuk ikut menandatangani perjanjian. Penandatanganan TAC oleh Tiongkok merupakan sebuah upaya untuk mengikat Tiongkok dalam mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul antara negara anggota ASEAN dengan Tiongkok untuk diselesaikan dengan menggunakan ASEAN way. Dapat ditebak bahwa salah satu konflik yang dimaksudkan adalah konflik laut Tiongkok Selatan. Disini dapat dilihat bahwa Indonesia menggunakan format kerjasama ASEAN untuk “menyetel” perilaku Tiongkok.

Upaya lain yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mengajukan konflik ini sebagai salah satu agenda dalam ASEAN Ministerial Meeting pada tahun 2012 lalu di Phnom Penh, Kamboja. Ajang pertemuan multilateral digunakan oleh Indonesia sebagai ajang untuk menyamakan pendapat dalam mencari solusi konflik. Pada waktu itu, Indonesia mengajukan permasalahan konflik LTS sebagai salah satu agenda meeting, yang sayangnya ditolak oleh Kamboja (C.A Thayer, 2013). Kegagalan dalam mengeluarkan kesepakatan seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, kemudian disikapi secara serius oleh Indonesia dengan mengirim Menlu Natalegawa ke empat negara

ASEAN sekaligus. Upaya Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah upaya untuk mempertahankan persatuan ASEAN, karena sebagai negara yang digelari *Natural Leader of ASEAN*, Indonesia selalu merasa bertanggung jawab untuk ikut andil dalam setiap penyelesaian konflik di ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia membutuhkan kesatuan suara dalam ASEAN karena Indonesia ingin menggunakan kerjasama ASEAN untuk menyelesaikan konflik, sehingga dibutuhkan suara yang satu dari ASEAN, sebelum kemudian mengundang Tiongkok untuk bersepakat.

Keberhasilan dari upaya panjang yang dilakukan oleh Indonesia dengan melibatkan kerjasama ASEAN adalah ditandatanganinya Declaration on Conduct (DoC) antara ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2002 (Buszynski, 2003). DoC meminta setiap negara yang terlibat konflik untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif yang dapat memancing konflik bersenjata. DoC juga meminta negara-negara yang terlibat konflik untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan mereka dengan jalan damai. DoC merupakan sebuah kesuksesan bagi ASEAN, karena Tiongkok selalu menolak untuk menyelesaikan konflik ini dengan framework multilateral (Buszynski, 2003), Tiongkok lebih menyenangi penyelesaian secara bilateral.

Sayangnya, DoC gagal dalam menyanggah tugas utamanya. DoC adalah sebuah perjanjian (*agreement*) informal yang daya ikatnya lebih rendah dari pada *treaty*, sehingga tidak ada hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar perjanjian tersebut (Rowan, 2005). Rowan lalu menambahkan bahwa terdapat kelemahan pada DoC, yaitu kurang jelasnya permasalahan geografi terkait kepulauan Spratlys dan kepulauan Parcel. Sebagai akibatnya, tensi diantara pihak yang bertikai tetap bertahan. Pada tahun 2006, Tiongkok membuat pengumuman yang provokatif terkait kepulauan Parcel, lalu terjadi juga pengancaman terhadap nelayan Vietnam yang sedang melakukan aktivitas pemancingan ikan disekitaran Pulau Spratly pada bulan Juli tahun 2007, termasuk pengumuman kepemilikan yang dilakukan oleh Filipina terhadap Scarborough Shoal dan Kalayan Islands Group, yang memancing protes keras dari Tiongkok (Hongfang, 2011).

Berbagai kekerasan yang terus terjadi paska dikeluarkannya DoC memberikan sinyal bahwa dibutuhkan perjanjian yang lebih mengikat, dan Indonesia melihat bahwa Code of Conduct (CoC) sebagai sebuah perjanjian yang lebih mengikat, perlu untuk dirumuskan dan ditandatangani oleh Tiongkok. Menlu Natalegawa menyatakan bahwa "*absent a code of conduct, absent a diplomatic process, we can be certain of more*

*incidents and more tensions for our region"* (Adam, 2012). Sejalan dengan itu, pada sebuah forum pada tanggal 17 Juli 2012, presiden SBY mengungkapkan bahwa *"a meaningful and practicable code of conduct in the South China Sea is central to improving confidence building. It will help enhance predictability and bolster stability in a region that desperately needs it"* (A. Manners) Pernyataan ini kemudian ditindak lanjuti oleh Indonesia dengan mensponsori berbagai dialog antara negara ASEAN dengan tujuan agar negara ASEAN dapat bersepakat dan mempunyai satu suara, sehingga kemudian dapat menghadapi Tiongkok secara bersama-sama dalam meja perundingan.

Pembuatan CoC merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan negara ASEAN secara keseluruhan. Untuk dapat menghasilkan CoC, negara-negara ASEAN perlu untuk bernegosiasi dan bersepakat terlebih dahulu. Keyakinan Indonesia akan pentingnya CoC memberikan indikasi bahwa Indonesia akan lebih memperhatikan kondisi domestik ASEAN, untuk memastikan bahwa CoC yang diidam-idamkan ini dapat segera terbentuk. Sepertinya keyakinan inilah yang kemudian menjadi dasar keaktifan Indonesia dalam memperkuat ASEAN dan meningkatkan kesadaran akan satu ASEAN, sehingga negosiasi akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Disini dapat kita lihat bahwa lagi-lagi upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah upaya untuk memperkuat kerjasama dalam ASEAN.

Konflik LTS memang merupakan sebuah konflik yang unik dan menarik. Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan negara-negara yang berkonflik, turut berupaya untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan ini. Uniknya, upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah upaya untuk memperkuat ASEAN, bukan upaya langsung terhadap Tiongkok. Bagi Indonesia, menyelesaikan konflik ini seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerjasama ASEAN, sehingga negara-negara ASEAN yang lemah tidak perlu menghadapi Tiongkok secara bilateral, tetapi sebaiknya dengan menggunakan kerangka kerjasama ASEAN. Karena itu, upaya penyelesaian konflik yang banyak diperlihatkan Indonesia adalah upaya internal penguatan ASEAN. Terlihat indikasi bahwa Indonesia mencoba mendekati Tiongkok secara bilateral, akan tetapi pendekatan bilateral ini dilakukan Indonesia untuk memastikan bahwa Tiongkok bersedia untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui bingkai kerjasama ASEAN.

## **PENUTUP**

Konflik LTS merupakan sebuah konflik yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak negara. Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap konflik ini,

karena permasalahan perbatasan ini melibatkan 4 negara ASEAN, sehingga bukan tidak mungkin konflik ini dapat mengganggu pelaksanaan Komunitas ASEAN. Menilik keterlibatan 4 negara ASEAN dalam konflik, Indonesia kemudian secara aktif melakukan berbagai upaya untuk mencegah eskalasi konflik. Berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan diatas memperlihatkan bahwa Indonesia menginginkan penyelesaian melalui jalur multilateral dengan memanfaatkan kerjasama ASEAN. Akibatnya, upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Indonesia lebih banyak dilakukan dalam internal ASEAN, bukan secara langsung terhadap Tiongkok, sebagai negara utama yang paling ditakuti dalam konflik. Indonesia berupaya untuk memperkuat ASEAN dan mempersatukan negara-negara ASEAN, meyakinkan mereka akan pentingnya *one voice in ASEAN* sehingga jika negara-negara ASEAN telah memiliki satu suara, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengajukan penawaran kepada Tiongkok. Penyelesaian konflik secara bilateral ditakuti Indonesia akan merugikan negara-negara ASEAN yang lemah. Indikasi-indikasi yang telah dijelaskan diatas memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan konflik adalah menyelesaikan konflik dengan memanfaatkan kerjasama ASEAN.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, "Indonesia key to resolving tensions in South China Sea", *Epoch Times*, 7 September 2012, view online <http://www.theepochtimes.com/n2/world/indonesia-key-to-resolving-tensions-in-south-china-sea-289314.html>, 10 October 2012
- Adnan, AH "Saling Keterkaitan Politik Luar Negeri RI dan keadaan dalam Negeri" (Mutual linkage between Indonesia's foreign policy and domestic situation) in S. Hartono; H. Djarab and L.Irahali (eds), *Semangat Kebangsaan dan Politik Luar Negeri Indonesia* (the Spirit of Nationality and Indonesia's Foreign Policy), Angkasa Bandung, 2002
- Anwar, D.F, "Posisi dan Peran Strategis Indonesia dalam konstalasi Politik Internasional"(Indonesia's strategic position and role in the constelation of International Politic) , in S. Hartono; H. Djarab and L.Irahali (eds), *Semangat Kebangsaan dan Politik Luar Negeri Indonesia* (the Spirit of Nationality and Indonesia's Foreign Policy), Angkasa Bandung, 2002
- Baviera.'The South China Sea Disputes after the 2002 Declaration : Beyond Confident Building' in Saw Swee-Hock, Sheng Lijun & Chin Kin wah (ed), *ASEAN –China Relations Realities and Prospect*, ISEAS, Singapore 2005.
- Blumenthal as quoted by P.Barta, "Sea Dispute Upends Asian Summit", *The Wall Street Journal*, 23 July 2012, view online <http://www.intellectualltakeout.org/library/articles-commentary-blog/sea-dispute-upends-asian-summit>

- Buszynski, “ ASEAN, the Declaration on Conduct and the South China Sea”, *Contemporary Southeast Asia*, No.3 (2003) : 343-62
- Hongfang, “South China Sea Issue in China-ASEAN Relations : An Alternative Approach to Ease the Tension”, *International Journal of China Studies*, V.2, No.3, pp. 585-600, Dec 2011
- Irsan,A,*Politik Luar Negeri Indonesia dan tantangannya* (Indonesia’s Foreign Policy and its callenges), in in S. Hartono; H. Djarab and L.Irahali (eds), *Semangat Kebangsaan dan Politik Luar Negeri Indonesia* (the Spirit of Nationality and Indonesia’s Foreign Policy), Angkasa Bandung, 2002
- Lam, W “Beijing’s Aggressive New Foreign Policy and implications for the South China Sea”, *China Brief*, Vo. XIII, Issue 13, June 12, 2013
- Natalegawa, “2013 Annual Press Statement”, 4 January 2013, *Speeches by Marty Natalegawa*, Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, <http://kemlu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Menteri&IDP=791&l=en>
- Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, *Directions of Indonesia’s Foreign Policy*,<http://www.kemlu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=21&l=en>,
- President Yudhoyono as quoted by A. Manners, “China Strengthen ties with Indonesia, ASEAN as Obama stays grounded”, *Strategic Analysis*, 9 October 2013
- Rowan, “The security Alliance, ASEAN, and the South China Sea dispute”, *Asian Survey*, Vol. 45. No.3, June 2005, pp.414-436
- Storey, “Slipping away? A south China Sea Code of Conduct Eludes Diplomatic efforts”, *East and South China Seas Bulletin* No,11, Center for a new American Security, March 20, 2013
- Sukma ,Rizal, “Indonesia’s response to the rise of China : Growing Comfort amid Uncertainties” in Jun Tsunekawa (eds) *The Rise of China : Responses from Southeast Asia and Japan*, Tokyo 2009
- Supryanto, “Indonesia and the South China Sea dispute”, *The Jakarta Post*, 4 July 2011, view online <http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/04/indonesia-and-south-china-sea-dispute.html>
- Swaine and Fravel, “China’s assertive behaviour, Part Two : The Maritime Periphery”, *China Leadership Monitor* No.35 2012
- Thayer, “China’s new wave of aggressive assertiveness in the SCS:, paper to conference on Maritime Security in the SCS, Washington June 2011
- Ungerer, C “Making mischief : the return of the South China Sea dispute”*ASPI Special Report*, Issue 36, December 2010
- Weasley, M “ What’s at stake in the South China Sea”, *Lowy Institute for International Policy*, 2012, <http://www.lowyinstitute.org/publications/whats-stake-south-china>

Zhiguo, G “South China Sea : Turning Suspicion into Mutual Understanding and Cooperation” in Saw Swee-Hock, Sheng Lijun & Chin Kin wah (eds), *ASEAN – China Relations Realities and Prospect*, ISEAS, Singapore 2005